

**JUAL BELI GAJI BURUH
DALAM TINJAUAN HUKUM ISLAM**

**(Studi Pada Buruh Pisang di Desa Gunung Batin Udik Kecamatan
Terusan Nunyai Lampung Tengah)**



Skripsi

Ditujukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Oleh:

Dessy Susanti (1621030454)
Program Studi: Muamalah

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG**

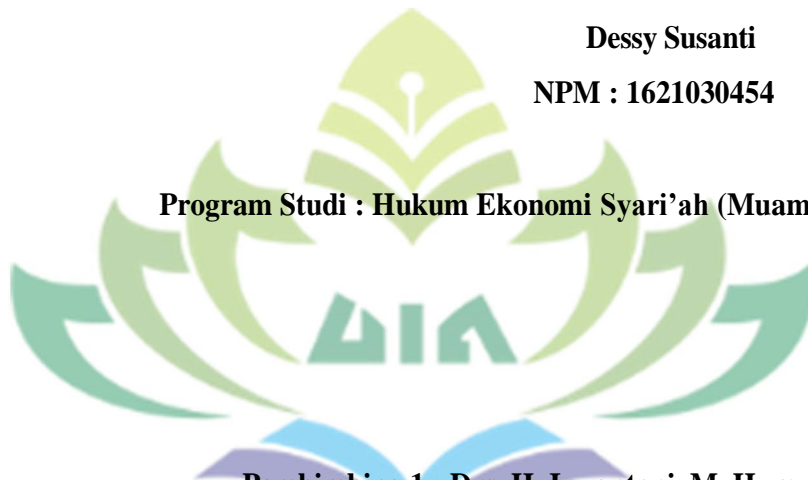
1441 H/ 2020 M

JUAL BELI GAJI BURUH DALAM TINJAUAN HUKUM ISLAM
(Studi Pada Buruh Pisang di Desa Gunung Batin Udik Kecamatan Terusan Nunyai
Lampung Tengah)

Skripsi
Diajukan Untuk Memenuhi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Dalam Fakultas Syari'ah

Oleh :
Dessy Susanti
NPM : 1621030454

Program Studi : Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)



Pembimbing 1 : Drs. H. Irwantoni, M. Hum
Pembimbing 2 : Eko Hidayat, S.Sos., M.H

FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG

1441 H / 2020 M

ABSTRAK

Jual beli merupakan suatu bentuk adanya interaksi sesama manusia, sebagai usaha bagi manusia tersebut untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dalam ajaran Islam jual beli harus sesuai syariat Islam, baik dari segi rukun dan syaratnya. Jual beli yang tidak memenuhi rukun dan syaratnya jual beli akan berakibat tidak sahnya jual beli yang dilakukan. Praktik yang terjadi pada masyarakat di Desa Gunung Batin Udik Kecamatan Terusan Nunyai Lampung Tengah yang terkait dengan jual beli gaji, transaksi ini biasanya terjadi karena kebutuhan ekonomi yang mendesak yang sering membuat masyarakat memilih jalan untuk menjual gajinya, masyarakat di Desa Gunung Batin Udik Kecamatan Terusan Nunyai Lampung Tengah ini biasanya menjual gajinya pada orang lain yang berminat atau yang memiliki uang, biasanya mereka menjual gaji tersebut dengan harga lebih murah dibandingkan nominal gaji yang akan didapatkan nantinya. Pemilik gaji (penjual) menanggihkan gaji tersebut kepada pembeli dan menyerahkan ATM (*Autometic Teller Machine*) beserta kode PIN.

Adapun permasalahan dalam skripsi ini adalah 1. Bagaimana praktik jual beli gaji buruh dalam tinjauan hukum Islam di Desa Gunung Batin Udik Kecamatan Terusan Nunyai? 2. Bagaimana tinjauan hukum Islam tentang jual beli gaji buruh di Desa Gunung Batin Kecamatan Terusan Nunyai Lampung Tengah? Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana praktik jual beli gaji buruh di Desa Gunung Batin Udik Kecamatan Terusan Nunyai Lampung Tengah, serta untuk mengetahui Bagaimana tinjauan hukum Islam tentang pelaksanaan jual beli gaji buruh di Desa Gunung Batin Udik Kecamatan Terusan Nunyai Lampung Tengah.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat normatif. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan metode observasi dan wawancara. Pengolahan data dilakukan dengan menggunakan teknik editing *koding* dan sistematisasi data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa transaksi jual beli gaji buruh yang terjadi di Desa Gunung Batin Udik Kecamatan Terusan Nunyai Lampung Tengah ini terjadi dikarenakan kebutuhan yang amat mendesak yang menyebabkan si pemilik gaji (penjual) menjual gajinya kepada orang lain dengan harga yang lebih murah. Transaksi jual beli gaji buruh ini pada dasarnya bukanlah akad jual beli melainkan akad utang piutang yang dimana si pemilik gaji (penjual) menanggihkan gaji yang ia miliki kepada si pembeli yang pada saat itu bersedia memberikan uang kepada si pemilik gaji (penjual) dengan syarat si pemilik gaji (penjual) memberikan jaminan berupa ATM (*Autometic Teller Machine*) beserta kode PIN kepada si pembeli. Praktik jual beli gaji buruh di Desa Gunung Batin Udik Kecamatan Terusan Nunyai Lampung Tengah ini dapat dikatakan haram karena mengandung unsur riba di dalamnya.



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat : Jl. Letkol. H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung, Tlp (0721) 703289

PERSETUJUAN

**Judul : JUAL BELI GAJI BURUH DALAM TINJAUAN
HUKUM ISLAM (Studi Pada Buruh di Desa
Gunung Batin Udik Kecamatan Terusan Nunyai
Lampung Tengah)**
Nama : Dessy Susanti
Npm : 1621030454
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Fakultas : Syariah

MENYETUJUI

**Untuk dimunaqosahkan dan dipertahankan dalam sidang
Munaqosyah Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.**

Pembimbing I

Pembimbing II


Drs. H. Irwantoni, M. Hum
NIP. 196010211991031002


Eko Hidayat, S.SOS., M.H.
NIP. 197512302003121002

Mengetahui
Ketua Jurusan Muamalah


Khoiruddin, M.S.I
NIP. 197807252009121002



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat : Jl. Letkol. H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung, Tlp (0721) 703289

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **“JUAL BELI GAJI BURUH DALAM TINJAUAN HUKUM ISLAM (Studi Pada Buruh di Desa Gunung Batin Udik Kecamatan Terusan Nunyai Lampung Tengah)”** disusun oleh Dessy Susanti, NPM: 1621030454, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah), Telah di Ujikan dalam sidang Munaqasah di Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung pada Hari/Tanggal : Selasa, 30 Juni 2020.

TIM DEWAN PENGUJI

Ketua : Marwin, S.H., M.H

Sekretaris : Abuzar Alghifari, S.Ud., M.Ag.

Penguji I : Dr. H. Mohammad Rusfi, M.Ag.

Penguji II : Drs. H. Irwantoni, M. Hum.

Penguji III : Eko Hidayat, S.Sos., M.H.



**Mengetahui
Dekan Fakultas Syariah**

Dr. Khairuddin, M.H.
NIP. 196210221993031002

MOTTO

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً

عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ؕ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ؕ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

“Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”. (QS An-Nisa:29)



RIWAYAT HIDUP

Dessy Susanti, dilahirkan di Astra Kesetra pada tanggal 01 Desember 1994, anak pertama dari pasangan Bapak Fermaja Hudi dan Ibu Masnona. Pendidikan dimulai dari Sekolah Dasar (SD) Islam Terpadu Bustanul ‘Ulum Lampung Tengah dan selesai pada tahun 2007. SMPN 01 Tulang Bawang Tengah selesai tahun 2010. SMKN 01 Terusan Nunyai selesai pada tahun 2013. Tahun 2016, penulis melanjutkan pendidikan kejenjang perguruan tinggi, yaitu pada Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung, mengambil Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) pada Fakultas Syariah.



Bandar Lampung, Juni 2020
Penulis

Dessy Susanti
NPM. 1621030454

PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirrahim.

Teriring do'a dan rasa syukur kepada Allah SWT, atas segala limpahan berkah, nikmat, kedamaian, keindahan dan kemudahan dalam menjalani dan memaknai kehidupan ini. Serta rasa sayang, restu dan perlindungan-Nya yang selalu mengiringi di setiap hela nafas dan langkah kaki ini. Maka dengan ketulusan hati dan penuh kasih sayang aku persembahkan karya sederhana ini sebagai tanda cinta, sayang dan hormat tak terhingga kepada orang-orang terkasih:

1. Orang yang paling berjasa dalam hidupku kedua orang tuaku, Ayahandaku tercinta Fermaja Hudi dan Ibundaku tercinta Masnona yang telah membesarkan dan mendidikku serta tak pernah melewatkan shalat 5 waktunya tanpa mendo'akanku, memberikanku semangat tak ada henti-hentinya mencurahkan kasih sayangnya, memberikan motivasi dan pengorbanan, selalu menyertai langkahku dalam menggapai cita-cita, terimakasih atas segala hal yang telah kalian berikan, atas untaian do'a yang tak pernah henti. Terimakasih yang tak terhingga untuk segalanya. Semoga Allah SWT selalu melindungi kalian dimanapun kalian berada, Aamiin Allahumma Aamiin.
2. Abangku dan Adikku tercinta Candra Kirana, Fina Octia dan Dino Kurniawan. Terimakasih atas segala do'a dan motivasi yang selalu menjadi semangat bagi penulis.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikumWr. Wb

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, karena atas kasih dan sayang-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “ **Jual Beli Gaji Buruh Dalam Tinjauan Hukum Islam (Studi Pada Buruh di Desa Gunung Batin Udik Kecamatan Terusan Nunyai Lampung Tengah)**”. Shalawat beriring salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, keluarga, para sahabat serta umatnya yang setia pada titah dan cintanya.

Karya ilmiah berupa skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) di Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis banyak menerima bimbingan dan dukungan serta tidak mengurangi rasa terima kasih dari semua pihak. Untuk itu penulis haturkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Moh Mukri, M.Ag. Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang telah member kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu di kampus tercinta ini;
2. Bapak Dr. H. Khairuddin Tahmid, M.H. Selaku Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang senantiasa tanggap terhadap kesulitan mahasiswa;

3. Bapak Khoiruddin, M.S.I, Selaku Ketua Jurusan Muamalah dan Ibu Juhratul Khulwah, M.S.I. Selaku Sekretaris Jurusan Muamalah yang senantiasa membantu dan mengarahkan mahasiswa dalam proses pengajaran yang baik;
4. Bapak Drs. H. Irwantoni, M.Hum Selaku pembimbing I dan Bapak Eko Hidayat, S.Sos., M.H. selaku pembimbing II yang telah banyak mencurahkan pemikiran, mengarahkan, dan meluangkan waktunya dengan penuh kesabaran dalam membimbing penulis untuk menyelesaikan skripsi ini;
5. Seluruh dosen dan pegawai Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung yang telah membimbing dan memberikan banyak ilmu selama mengikuti perkuliahan;
6. Kepala dan pimpinan perpustakaan pusat dan Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung yang telah membantu memberikan informasi, data, maupun referensi;
7. Rekan-rekan Muamalah Angkatan 2016 khususnya kelas I yang telah memberikan semangat dan motivasinya dalam penyusunan skripsi ini. Terimakasih atas kebersamaannya, tawa tangis, dan keringat dalam menempuh pendidikan di kampus UIN Raden Intan Lampung;
8. Sahabat-sahabatku tercinta Heni Lia Widiastuti, Amalia Tata Rizkina, Fitria Afifah, Yunita Dyah Permatasari, Dana Angguningtias yang selalu setia membimbing, menasehati, mengingatkan, ketika penulis mulai salah dan selalu memberikan dorongan serta semangat kepada penulis;
9. Teman-Teman KKNku tercinta kelompok 110 Terimakasih selalu memberi semangat dan memberikan dorongan kepada penulis;

10. Serta semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu;

11. Almamaterku tercinta Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Semoga do'a dan segala bantuan menjadi amal kebaikan bagi yang bersangkutan dan Allah SWT memberikan imbalan dan pahala yang berlimpah serta kesehatan umur yang panjang. Aamiin Allahumma Aamiin.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa karya ilmiah ini masih jauh dari kesempurnaan, karena keterbatasan yang ada pada penulis, tentunya hal tersebut sangat mewarnai isi tulisan ini. Untuk itu, kiranya pembaca dapat memberikan masukan dan saran yang membangun untuk melengkapi tulisan ini.

Akhir kata, semoga karya ilmiah ini menjadi sumbangan yang cukup berarti dalam pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya ilmu Islam.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Bandar Lampung, Juni 2020
Penulis

Dessy Susanti
NPM : 1621030454

DAFTAR ISI

ABSTRAK	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
PENGESAHAN	iv
MOTTO	v
RIWAYAT HIDUP	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Penegasan Judul	1
B. Alasan Memilih Judul	2
C. Latar Belakang Masalah.....	3
D. Fokus Penelitian	8
E. Rumusan Masalah	8
F. Tujuan Penelitian	8
G. Signifikansi Penelitian	8
H. Metode Penelitian.....	9
BAB II KAJIAN TEORI	
A. Jual Beli	
1. Pengertian Jual Beli.....	15
2. Dasar Hukum Jual Beli	16
3. Rukun dan Syarat Jual Beli.....	18
4. Macam-Macam Jual Beli	24
5. Jual Beli Yang Dilarang.....	31
B. <i>Qard</i>	
1. Pengertian <i>Qard</i>	38
2. Dasar Hukum <i>Qard</i>	40
3. Rukun dan Syarat <i>Qard</i>	42
4. Hikmah dan Manfaat <i>Qard</i>	44
C. Riba	
1. Pengertian Riba	45
2. Dasar Hukum Riba	47
3. Sebab-Sebab Haramnya Riba.....	49
4. Macam-Macam Riba.....	49
5. Hikmah dilarangnya Riba	51
D. Tinjauan Pustaka	52
BAB III LAPORAN HASIL PENELITIAN	
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	
1. Profil Desa Gunung Batin Udik Kec. Terusan Nunya Lampung Tengah.....	57

2. Letak Geografis Desa Gunung Batin Udik	60
B. Pelaksanaan Jual Beli Gaji Buruh	
1. Cara Melaksanakan Perjanjian.....	61
2. Cara Menetapkan Harga.....	64
3. Pandangan Tokoh Masyarakat Mengenai Jual Beli Gaji Buruh	65

BAB IV ANALISIS DATA

A. Praktek Jual Beli Gaji Buruh di Desa Gunung Batin Udik Kec. Terusan Nunyai Lampung Tengah.	67
B. Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Gaji Buruh di Desa Gunung Batin Kec. Terusan Nunyai Lampung Tengah	69

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	74
B. Saran	75

DAFTAR PUSTAKA **LAMPIRAN**



BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Sebelum melakukan pembahasan lebih lanjut, agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam makna yang terkandung dalam judul, maka penulis memerlukan adanya pembatasan arti kalimat dengan harapan memperoleh gambaran yang jelas dari makna yang dimaksud. Adapun judulnya adalah **“JUAL BELI GAJI BURUH DALAM TINJAUAN HUKUM ISLAM”** (Studi Pada Buruh Pisang di Desa Gunung Batin Udik Kecamatan Terusan Nunyai Lampung Tengah). Adapun istilah-istilah dalam judul adalah:

Jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela di antara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang dibenarkan Syara' dan disepakati.¹

Gaji adalah balas jasa yang diterima pekerja dalam bentuk uang dalam waktu tertentu.² Gaji merupakan suatu bentuk pembayaran atau kompensasi periodik dari seorang majikan (perusahaan) pada karyawannya sesuai dengan kontrak atau kesepakatan yang berlaku antara kedua belah pihak.

Buruh adalah orang yang bekerja dengan mendapat upah; pekerja.³
Buruh adalah mereka yang bekerja pada usaha perorangan dan diberikan

¹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), h. 68-69

² Departement Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008) h. 426

³ *Ibid.*, h. 241

imbalan secara harian maupun borongan sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.

Hukum Islam adalah seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah SWT dan sunnah Rasul, tentang tingkah laku manusia mukallaf yang diakui dan diyakini mengikat untuk semua yang beragama Islam.⁴

Berdasarkan yang telah dijelaskan diatas, yang dimaksud dengan judul penelitian ini adalah bagaimana menurut hukum Islam tentang jual beli gaji buruh yang dilakukan di Desa Gunung Batin Kecamatan Terusan Nunyai Lampung Tengah.

B. Alasan Memilih Judul

Alasan penulis memilih judul “Jual Beli Gaji Buruh dalam Tinjauan Hukum Islam” ini yaitu:

1. Alasan Objektif, Jual Beli merupakan suatu hal yang dibolehkan dalam Islam, akan tetapi sudahkah pelaksanaan Jual Beli Gaji Buruh yang terjadi di Desa Gunung Batin Udik Kecamatan Terusan Nunyai Lampung Tengah sudah sesuai dengan syariat Islam.
2. Alasan subjektif, agar penulis mendapat gelar di Fakultas Syari'ah yang mana penelitian ini merupakan permasalahan yang berkaitan dengan jurusan Mu'amalah Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung tempat dimana penulis menuntut ilmu dan memperdalam ilmu pengetahuan, serta agar penulis mampu memahami topik yang dibahas, data dan

⁴ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jilid I, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), h.5

literatur yang mendukung pembahasan penelitian ini sehingga dapat diselesaikan tepat pada waktunya.

C. Latar Belakang Masalah

Islam merupakan agama yang universal dan menyeluruh, yang tidak hanya mengatur masalah ibadah tetapi juga sebagai aturan-aturan dan fondasi setiap umat muslim yang dimulai dari hal kecil hingga hal besar. Mayoritas masyarakat Indonesia beragama Islam, sehingga mempengaruhi terbentuknya suatu aturan yang berdasarkan atas agam Islam.

Salah satu aturan dalam Islam yaitu mengatur tentang jual beli, jual beli ialah tukar-menukar suatu barang, baik dilakukan dengan uang maupun barang dengan barang atau benda yang lain atas dasar suka sama suka diantara kedua belah pihak, yang biasa disebut *an taraadin*, artinya atas dasar kerelaan kedua belah pihak, yakni pihak pembeli dan pihak penjual.⁵

Jual beli merupakan suatu kegiatan yang sudah lama dilaksanakan oleh manusia untuk memenuhi segala kebutuhan hidupnya. Pada prinsipnya jual beli hukumnya halal, namun bagaimana cara kita berjual belinya itu yang dapat menjadikan hukum jual beli beralih hukum.⁶

Jual beli disyariatkan berdasarkan Al-Quran, sunnah dan ijma', yakni diantaranya firman Allah dalam surat An-Nisa: 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

⁵ Muhammad Ali, *Fiqih*, (Bandar Lampung: Anugrah Utama Raharja, 2013), h. 95

⁶ Ibrahim, *Penerapan Fikih*, (Solo: Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2004), h.3

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”⁷

Ayat di atas menjelaskan bahwa sesama manusia tidak diperbolehkan memakan harta sesamanya dengan jalan yang batil/jalan yang tidak dianjurkan dan dibenarkan dalam syari’at Islam. Islam adalah agama yang menjamin perdamaian dan keharmonisan hidup manusia. Islam menentang segala bentuk aktivitas yang menyebabkan permusuhan dan pertikaian dalam masyarakat. Maka sebelum melaksanakan jual beli, sebaiknya harus memperhatikan syarat dan rukun dalam berjual beli.

Terdapat rukun dan syarat-syarat dalam jual beli yang harus dipenuhi agar sahnya jual beli tersebut. Tujuan adanya syarat tersebut antara lain untuk menghindari pertentangan diantara manusia, menjaga kemaslahatan orang yang sedang berakad dan lain-lain. Jika jual beli tidak memenuhi syarat terjadinya akad, akad tersebut batal/tidak sah.

Adapun hikmah disyariatkannya jual beli adalah merealisasikan keinginan seseorang yang terkadang tidak mampu diperolehnya, dengan adanya jual beli dia mampu untuk memperoleh sesuatu yang diinginkannya, karena pada umumnya kebutuhan seseorang sangat terkait dengan sesuatu yang dimiliki saudaranya. Dapat diartikan bahwa hikmah diperbolehkannya jual beli adalah menghindarkan manusia dari kesulitan bermu’amalah.⁸

⁷ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Bandung: Penerbit Diponegoro, 2005), h.65

⁸ Sudarto, *Ilmu Fikih*, (Yogyakarta: Deepublish, 2018), h.256

Aturan lainnya yang diatur dalam Islam yaitu *Qard* (hutang piutang), *Qard* (hutang piutang) adalah memberikan harta kepada orang yang akan memanfaatkannya dan mengembalikannya dikemudian hari.⁹ Dapat dipahami bahwa *qard* adalah pinjaman uang atau modal yang diberikan seseorang kepada pihak lainnya, dimana pinjaman tersebut digunakan untuk usaha atau menjalankan bisnis tertentu. Pihak peminjam berkewajiban mengembalikan pinjaman tersebut sesuai dengan jumlah yang dipinjamnya tanpa bergantung pada untung atau rugi usaha yang dijalankannya.¹⁰

Landasan hukum disyariatkannya *qard* berdasarkan firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 245:

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْصُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

Artinya: siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), maka Allah melipatgandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak.¹¹

Kaum muslimin juga telah sepakat bahwa *qard* disyariatkan dalam bermu'amalah. Hal ini karena di dalam *qard* terdapat unsur untuk meringankan beban orang lain tanpa mengharap balasan.

Aturan lainnya yang diatur dalam Islam salah satunya ialah Riba, riba adalah perbuatan jahiliyah yang paling ditentang dalam Islam. Tidak ada ancaman baik yang tersirat maupun tersurat yang lebih keras dibandingkan

⁹ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah Fiqh Muamalah*, (Jakarta:Prenadamedia Group, 2012), h. 331

¹⁰ Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Jakarta: Rajawali Pers,2016), h. 169

¹¹Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*,(Bandung: Penertbit Diponegoro,2005), h.39

dengan ancaman Allah berkenaan dengan riba.¹² Orang yang melakukan praktik riba hidup dalam situasi gelisah, tidak tentram, selalu bingung dan berada kepada ketidakpastian disebabkan karena pikiran mereka yang tertuju kepada materi dan penambahannya.¹³ Allah menyatakan perang pada pemakan harta riba, Allah akan menimpakan hukuman dan siksa yang ditujukan pada individu, masyarakat, umat ataupun bangsa.¹⁴ Riba merupakan aktivitas yang sejak awal bertentangan dengan kaidah dan konsep keimanan secara mutlak. Selain itu, riba juga merupakan sistem yang didasarkan pada konsep yang sama sekali berbeda dari konsep kekhalifahan manusia dan keimanan. Maka dari itu Allah melarang praktik riba dalam kehidupan kita. Kita sebagai manusia harus lebih dapat membedakan antara yang diperbolehkan (halal) dan yang dilarang (haram) dan juga antara yang *haq* dan yang *bathil*.

Adapun salah satu permasalahan yang terjadi di masyarakat di Desa Gunung Batin Udik Kecamatan Terusan Nunyai Lampung Tengah yaitu terkait jual beli gaji. Transaksi ini biasanya terjadi karena kebutuhan ekonomi yang mendesak yang sering membuat masyarakat memilih jalan untuk menjual gajinya, masyarakat di Desa Gunung Batin Udik Kecamatan Terusan Nunyai Lampung Tengah ini biasanya menjual gajinya pada orang lain yang berminat atau yang memiliki uang, biasanya mereka menjual gaji tersebut dengan harga lebih murah dibandingkan nominal gaji yang akan ia

¹² Sayyid Quthb, *Tafsir Ayat-Ayat Riba*, (Jakarta Selatan: Wali Pustaka, Cet. Ke-1, 2018), h. 8

¹³ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah vol. 1*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), h. 588

¹⁴ Sayyid Quthb, *Tafsir Ayat-Ayat Riba*, (Jakarta Selatan: Wali Pustaka, Cet. Ke-1, 2018), h. 9

dapatkan. Pembeli biasanya mendapatkan kelebihan uang berkisar 15% sampai dengan 20% dikarenakan si pemilik gaji (penjual) tidak memberikan secara kontan gaji tersebut kepada pembeli di awal akad atau dengan kata lain si pemilik gaji (penjual) menangguhkan gajinya tersebut kepada pembeli.

Karena hal ini menarik untuk diteliti, disamping sebagai bagian dari cara manusia bertransaksi, juga merupakan masalah *fiqh muamalah* yang sesuai dengan ketentuan hukum, maksudnya ialah harus memenuhi persyaratan-persyaratan, rukun dan hal lainnya yang berkaitan dengan jual beli yang telah ditetapkan dalam Al-Quran, Sunnah dan Ijma' sehingga bila syarat-syarat dan rukunnya tidak terpenuhi maka tidak sesuai dengan kehendak *syara'*.

Untuk memahami masalah tersebut lebih dalam maka perlu dikemukakan bagaimana menurut tinjauan hukum Islam mengenai jual beli gaji pegawai tersebut. Oleh karenanya, umat Islam kontemporer harus bisa memformulasikan hukum dan ajaran sesuai dengan tuntutan masa dan lingkungannya dengan berdasarkan sumber aslinya yaitu Al-Quran dan Hadis sehingga sesuai dengan ajaran Islam.

Berdasarkan keterangan diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan pembahasan yang lebih jelas dengan judul **“Jual Beli Gaji Buruh dalam Tinjauan Hukum Islam (Studi Pada Buruh Pisang di Desa Gunung Batin Udik Kecamatan Terusan Nunyai Lampung Tengah).”**

D. Fokus Penelitian

Fokus penelitian proposal yang berjudul “ jual beli gaji buruh dalam tinjauan hukum Islam (Studi di Desa Gunung Batin Udik Kecamatan Terusan Nunyai Lampung Tengah)” , penulis lebih memfokuskan pada jual beli gaji buruh dalam tinjauan hukum Islam, sehingga diperbolehkan atau tidaknya transaksi tersebut dalam hukum Islam.

E. Rumusan Masalah

1. Bagaimana praktik jual beli gaji buruh di Desa Gunung Batin Udik Kecamatan Terusan Nunyai Lampung Tengah?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam tentang Jual beli gaji buruh di Desa Gunung Batin Udik Kecamatan Terusan Nunyai Lampung Tengah?

F. Tujuan Penelitian

Ada beberapa alasan penulis memilih judul ini sebagai bahan untuk penelitian, yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui praktik jual beli gaji buruh di Desa Gunung Batin Udik Kecamatan Terusan Nunyai Lampung Tengah.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam Tentang jual beli gaji buruh di Desa Gunung Batin Udik Kecamatan Terusan Nunyai Lampung Tengah.

G. Signifikasi Penelitian

1. Secara teoritis, penelitian ini sangat bermanfaat karena dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan mengenai jual beli gaji dalam tinjauan hukum Islam dan diharapkan dapat memperkaya pemikiran ke Islaman

pada umumnya, civitas akademik Fakultas Syari'ah, Jurusan Muamalah pada khususnya.

2. Secara praktisi, penelitian ini dimaksudkan sebagai suatu syarat memenuhi tugas akhir guna memperoleh gelar S.H pada fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Intan Lampung.

H. Metode Penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Menurut jenisnya, penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang dilakukan dalam kehidupan yang sebenarnya.¹⁵ Mengingat jenis penelitian adalah penelitian lapangan maka dalam pengumpulan data penulis menggali data-data yang bersumber dari lapangan (lokasi penelitian) dalam hal ini.

Selain itu, dalam penelitian ini penulis juga didukung dengan penelitian pustaka untuk mengumpulkan informasi dengan menggunakan buku, catatan, dokumen, jurnal, artikel dan refrensi lainnya yang berkaitan dengan hukum Islam tentang jual beli gaji buruh yang terjadi di Desa Gunung Batin Kecamatan Terusan Nunyai Lampung Tengah.

b. Sifat Penelitian

Apabila dilihat dari sifatnya, penelitian ini bersifat normatif, yaitu kegiatan penelitian yang dilakukan secara sistematis untuk

¹⁵ Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, (Jakarta:Bumi Aksara,2014), h.

menginterpretasikan masa lampau. Walaupun data yang dianalisis sudah lewat namun hasilnya dapat dimanfaatkan untuk menginterpretasikan atau memprediksi kejadian sekarang.¹⁶ Dalam penelitian ini akan dijelaskan mengenai jual beli gaji buruh dengan dijelaskan pula pandangan hukum Islam tentang kejadian dalam konteks masalah tersebut.

2. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung dilapangan oleh orang yang melakukan penelitian.¹⁷ Sumber data primer dalam penelitian ini diperoleh dari lapangan.

b. Data sekunder

Data sekunder merupakan sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen. Sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah sumber data yang diperoleh dari pustaka-pustaka yang terkait dengan permasalahan, khususnya berkenaan dengan jual beli, Al-Quran, Hadis dan buku-buku tentang fiqh yang terkait dengan jual beli.

¹⁶ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Yogyakarta: Rekana Cipta, 1993), h. 332

¹⁷ *Ibid.*, h. 82

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah keseluruhan objek penelitian dari kumpulan satuan atau kumpulan individu yang merupakan sasaran yang berkaitan dengan masalah penelitian.¹⁸ Populasi dalam penelitian ini adalah 8 orang yang telah menjual gajinya pada orang lain dengan harga lebih murah dan 2 orang yang membeli gaji buruh tersebut di Desa Gunung Batin Udik Kecamatan Terusan Nunyai Lampung Tengah dalam kurun waktu 3 bulan terakhir.

b. Sampel

Menurut Suharsimi Arikunto sampel adalah sebagian populasi atau wakil yang diteliti.¹⁹ Menurut Suharsimi Arikunto apabila yang diteliti kurang dari 100 lebih baik diambil semua sehingga penelitian merupakan penelitian populasi. Selanjutnya jika jumlah subjeknya lebih besar dapat diambil diantara 10-15% atau 20-25% atau lebih.²⁰ Berdasarkan penentuan jumlah sampel yang dijelaskan, sehingga penelitian mengambil sampel penelitian populasi karena jumlah populasi kurang dari 100.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama penelitian adalah untuk

¹⁸ Mardalis, *Metode Pendekatan Suatu Proposal*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2014), h. 53

¹⁹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Yogyakarta: Rekana Cipta, 1993), h. 102

²⁰ *Ibid*, h. 114

mendapatkan data. Dalam pengelolaan data ini, penulis menggunakan beberapa metode/cara yaitu diantaranya:

a. Observasi

Observasi atau pengamatan data dalam suatu penelitian, merupakan hasil perbuatan jiwa secara aktif dan penuh perhatian untuk menyadari adanya suatu rangsangan tertentu yang diinginkan, atau suatu studi yang di sengaja dan sistematis tentang keadaan/fenomena sosial dan gejala-gejala psikis dengan jalan mengamati dan mencatat.²¹ Observasi yang dilakukan yaitu dengan melakukan pengamatan terhadap sistem transaksi jual beli gaji buruh.

b. Wawancara (*interview*)

Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti untuk mendapatkan keterangan-keterangan lisan melalui bercakap-cakap dan berhadapan muka dengan orang yang dapat memberikan keterangan pada si peneliti.²²

5. Metode Pengolahan Data

Setelah semua data yang ada terhimpun kemudian diadakan pengolahan data. Langkah-langkah yang ditempuh untuk mengolah data adalah sebagai berikut:

²¹ Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2014), h. 63

²² *Ibid*, h. 64

a. Pemeriksaan Data (*Editing*)

Hal ini dilakukan setelah semua data yang kita kumpulkan melalui kuesioner atau angket atau instrumen lainnya. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah memeriksa kembali semua kuesioner tersebut satu persatu.²³

b. *Koding*

Memberi tanda *code* terhadap pertanyaan-pertanyaan yang telah diajukan, hal ini dimaksudkan untuk mempermudah waktu mengadakan tabulasi dan analisa. Jika pertanyaan terdiri dari beberapa item dan jumlah kuesioner yang banyak serta variabel yang satu dengan yang lainnya memerlukan *code* dan tanda-tanda tertentu seperti analisa dengan menggunakan komputer, maka hal pengkodean ini sangat diperlukan²⁴

c. Sistematisasi Data (*Systemating*)

Sistematisasi data yaitu usul penelitian tersebut disusun secara sistematis menurut pola tertentu dari yang paling sederhana sampai yang kompleks hingga tercapai tujuan secara efektif dan efisien atau dikatakan juga konsisten.²⁵

6. Analisis Data

Analisis data merupakan langkah selanjutnya untuk mengolah hasil penelitian menjadi suatu laporan. Analisis data adalah suatu proses

²³ Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2014), h. 77

²⁴ *Ibid*, h. 78

²⁵ *Ibid*, h. 31

mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi, dengan cara menyusun pola memilih mana yang penting yang harus dipelajari, membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami diri sendiri dan orang lain.²⁶ Metode analisa data yang digunakan dalam penelitian ini disesuaikan dengan kajian penelitian. Dengan menggunakan metode berfikir induktif yaitu metode yang mempelajari suatu gejala yang khusus untuk mendapatkan kaidah-kaidah yang berlaku di lapangan yang lebih umum mengenai fenomena yang diselidiki.



²⁶ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1991), h. 145

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Jual Beli

1. Pengertian Jual Beli

Jual beli merupakan transaksi yang dilakukan oleh pihak penjual dan pembeli atas suatu barang dan jasa yang menjadi objek transaksi jual beli.²⁷

Jual beli secara etimologi atau bahasa adalah pertukaran barang dengan barang (barter). Jual beli merupakan istilah yang dapat digunakan untuk menyebut dari dua sisi transaksi yang terjadi sekaligus, yaitu menjual dan membeli.²⁸

Sementara secara terminologi, ada beberapa definisi dan yang paling bagus adalah definisi yang disebutkan oleh Syaikh Al-Qalyubi dalam *Hayiyah*-nya bahwa “Akad saling mengganti dengan harta yang berakibat kepada kepemilikan terhadap satu benda atau manfaat untuk tempo waktu selamanya dan bukan untuk bertaqqarub kepada Allah.”²⁹

Ada juga yang mendefinisikan jual beli sebagai pemilikan terhadap harta atau manfaat untuk selamanya dengan bayaran harta.

Definisi jual beli ini merupakan padanan kata *syira'* (membeli) dan padanan sesuatu yang berbeda dan bergabung dengannya dibawah naungan dalil yang global. Dengan begitu akan terdiri dari dua bagian yang satunya adalah menjual (*al-bai'a*) dan dinamakan orang yang menjualnya sebagai

²⁷ Ismail, *Perbankan Syariah*, (jakarta: Prenada Media, 2011), h. 135

²⁸ Imam Mustofa, *Fiqh Mu'amalah Kontemporer*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h. 21

²⁹ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2010), h. 24

ba'i'an (penjual) dan didefinisikan sebagai pemilikan dengan ganti dengan cara khusus, dan menjadi lawan kata *syira'* (membeli) yang merupakan bagian kedua dan dinamakan orang yang melakukannya sebagai pembeli dan didefinisikan sebagai pemilikan dengan ganti juga.³⁰

Allah mensyariatkan jual beli sebagai suatu kemudahan untuk manusia dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya. Manusia mempunyai kebutuhan yang berbeda. Adakalanya sesuatu yang kita butuhkan itu ada pada orang lain. Untuk memenuhi kebutuhan itu seseorang tidak mungkin memebrihnya tanpa imbalan, untuk itu diperlukan hubungan interaksi dengan sesama manusia. Salah satu caranya adalah dengan jalan melakukan jual beli.³¹

Berdasarkan beberapa pendapat diatas, jual beli adalah transaksi tukar menukar barang berdasarkan suka sama suka menurut cara yang ditentukan syariat, baik dengan ijab dan kabul yang jelas, atau dengan cara saling memberikan barang atau uang tanpa mengucapkan ijab kabul.

2. Dasar Hukum Jual Beli

Diantara dalil atau landasan syariah yang memperbolehkan praktik jual beli adalah sebagai berikut:

a. Al-Quran

Al-Quran merupakan sumber utama hukum Islam, memberikan dasar-dasar diperbolehkannya jual beli guna memenuhi kebutuhan hidup

³⁰ *Ibid.*, h. 25

³¹ Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah Prinsip dan Implementasinya pada Sektor Keuangan Syariah*, (Jakarta:Rajawali Pers, 2016), h. 64

orang Islam. Hal ini dapat dilihat dalam firman Allah SWT dalam QS Al-Baqarah :275

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ...

Artinya: padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.³²

Ayat diatas menjelaskan bahwa Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba, ayat ini juga dapat dipahami untuk melakukan jual beli dengan mematuhi peraturan-peraturan yang telah ditetapkan dalam Islam.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang *bathil*, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku atas dasar suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” (QS An-Nisa: 29)³³

Ayat tersebut memberikan isyarat, bahwa perniagaan yang diperbolehkan dalam mu’amalah yang Islami adalah perniagaan yang dapat memperoleh keuntungan disamping juga bisa menimbulkan kerugian, tidak dapat disebut perdagangan, sehingga tidak diperbolehkan melakukan riba.³⁴

³² Departemen Agama, *Alquran dan Terjemahannya*, (Jakarta: J-ART,2004), h. 47

³³ *Ibid.*, h. 83

³⁴ Muhamad Abu Zahra, *Ushul Fiqih*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2008), h. 129

b. Hadis

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ: أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ قَالَ: (عَمَلُ الرَّجُلِ جُلٍ بِيَدِهِ، وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ). رَوَاهُ الْبَزَّازُ وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ

Artinya: Dari Rifa'ah ibnu Rafi' bahwa Nabi Muhammad SAW, pernah ditanya: apakah profesi yang paling baik? Rasulullah menjawab: “usaha dengan tangan manusia sendiri dan tiap jual beli yang diberkati” (HR. Al-Barzaar dan Al-Hakim).³⁵

Hadis diatas menjelaskan bahwa jual beli yang mendapat berkah dari Allah adalah jual beli yang jujur, tidak curang dan tidak mengandung unsur penipuan atau penghianatan.

c. Ijma'

Ulama telah sepakat bahwa jual beli dibolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya, tanpa bantuan orang lain. Namun demikian, bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkannya itu, harus diganti dengan barang lainnya yang sesuai.³⁶

3. Rukun dan Syarat Jual Beli

Jual beli akan sah apabila terpenuhi rukun dan syaratnya. Yang menjadi rukun jual beli dikalangan Hanafiyah adalah *ijab* dan *qabul*. Ini yang ditunjukkan oleh saling tukar menukar atau berupa saling memberi (*muathah*). Sementara itu, yang menjadi rukun jual beli dikalangan Jumhur ada empat. Adapun yang menjadi rukun jual beli adalah:

³⁵ Al- Hafidz Ibnu Hajjar Al-Asqalani, Terjemahan Bulughul Maram, Jeddah: Al-Thoba'ah Wal-Nashar Al-Tauzi'. t. Th, h. ۳۷۵

³⁶ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), h. 75

1. *Ba'i wa musytari* (penjual dan pembeli) disyaratkan:

a. Berakal dalam arti *mumayiz*

Jual beli tidak dipandang sah bila dilakukan oleh orang gila, dan anak kecil yang tidak berakal. Dalam hal ini terjadi perbedaan pendapat dikalangan ulama. Ulama dari kalangan Hanafiyah, Malikiyah dan Hanabilah berpendapat bahwa transaksi jual beli yang dilakukan anak-anak kecil yang telah *mumayiz* adalah sah selama ada izin dari walinya.

b. Atas kemauan sendiri

Jual beli yang dilakukan dengan paksaan dan intimidasi pihak ketiga tidak sah karena salah satu prinsip jual beli adalah suka sama suka.

c. Bukan pemboros dan pailit

Terhadap orang ini tidak dibenarkan melakukan jual beli karena mereka dikenakan *hajru* (larangan melakukan transaksi terhadap harta). Bagi pemboros dilarang melakukan jual beli adalah untuk menjaga hartanya dari kesia-kesian. Bagi orang pailit dilarang melakukan jual beli karena menjaga hak orang lain.

2. *Mabi' wa tsaman* (benda dan uang) diisyaratkan:

a. Milik sendiri

Barang yang bukan milik sendiri tidak boleh diperjualbelikan kecuali ada mandat yang diberikan oleh pemilik seperti akad *wikalah*

(perwakilan). Akad jual beli mempunyai pengaruh terhadap perpindahan hak milik.

- b. Benda yang diperjual belikan itu ada dalam arti yang sesungguhnya, jelas sifat, ukuran dan jenisnya.

Jual beli yang dilakukan terhadap sesuatu yang belum berwujud atau tidak jelas wujudnya tidak sah, seperti jual beli buah-buah yang belum jelas buahnya (masih dalam putik), jual beli anak hewan yang masih dalam perut induknya dan jual beli susu yang masih dalam susu induk (belum diperas).

- c. Benda yang diperjualbelikan dapat diserahkan ketika akad secara langsung maupun tidak langsung.
- d. Benda yang dijual belikan adalah *mal mutaqawwim*, *mal mutaqawwin* merupakan benda yang dibolehkan syariat untuk memanfaatkannya.³⁷

3. Sighat ijab dan kabul, diisyaratkan:

- a. Ijab dan kabul diucapkan oleh orang yang mampu (*ahliyah*).
- b. Kabul berkesesuaian dengan ijab, misalnya seseorang berkata “saya jual barang ini dengan harga sekian”. Kemudian dijawab “saya beli”, atau “saya terima kasih”, atau yang semakna dengan kalimat tersebut sesuai dengan kebiasaan, misalnya terimakasih.³⁸

³⁷ *Ibid.*, h. 68

³⁸ *Ibid.*, h. 69

Adapun yang menjadi syarat sahnya jual beli yaitu:

- 1) Syarat bagi orang yang melakukan akad jual beli antara lain:

Subjek jual beli, yaitu penjual dan pembeli harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a) Berakal, yaitu dapat membedakan atau memilih mana yang terbaik bagi dirinya, sebagaimana firman Allah:

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَمًا...

Artinya: “dan janganlah kamu berikan hartamu itu kepada orang yang bodoh (belum sempurna akal nya) harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan.” (Q.S An-Nisa (4) 5).³⁹

- b) Dengan kehendak sendiri (bukan paksaan), maksudnya bahwa dalam melakukan transaksi jual beli salah satu pihak tidak melakukan suatu tekanan atau paksaan kepada pihak lain, sehingga pihak lain pun dalam melakukan transaksi jual beli bukan karena kehendaknya sendiri.⁴⁰
- c) Keduanya tidak mubadzir, maksudnya bahwa para pihak yang mengikatkan diri dalam transaksi jual beli bukanlah orang-orang yang boros (mubadzir), sebab orang yang boros menurut hukum dikatakan sebagai orang yang tidak cakap bertindak.⁴¹

³⁹ Departemen Agama, *Alquran dan Terjemahannya*, (Jakarta: J-ART,2004), h. 77

⁴⁰ Khumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam di Indonesia (Aspek Hukum Keluarga dan Bisnis)*, (Bandar Lampung: Seksi Penerbitan Fakultas Syari'ah IAIN Raden Intan Lampung Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame, 2014), h. 113

⁴¹ Hendi Suhendi, *fiqih Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), h. 72

d) Baligh, yaitu menurut hukum Islam (fiqih), dikatakan baligh atau dewasa apabila telah berusia 15 tahun bagi anak laki-laki dan telah datang bulan bagi anak perempuan, oleh karena itu transaksi jual beli yang dilakukan anak kecil adalah tidak sah namun demikian bagi anak-anak yang sudah dapat membedakan mana yang baik dan yang buruk, tetapi ia belum dewasa (belum mencapai usia 15 tahun dan belum bermimpi atau belum haid) menurut sebagian ulama bahwa anak tersebut diperbolehkan untuk melakukan perbuatan jual beli, khususnya untuk barang-barang kecil dan tidak bernilai tinggi.⁴²

2) Syarat barang yang diperjual belikan:

- a) Barang yang dijadikan objek transaksi harus benar-benar ada dan nyata. Transaksi terhadap barang yang belum atau tidak ada tidak sah.⁴³
- b) Suci atau mungkin disucikan, tidak sah menjual barang yang najis, seperti anjing, babi dan lain-lain. Menurut riwayat lain dari Nabi dinyatakan “kecuali anjing untung berburu” boleh diperjualbelikan. Menurut Syafi’iyah bahwa sebab keharaman arak, bangkai, anjing dan babi karena najis,

⁴² Khumedi Ja’far, *Hukum Perdata Islam di Indonesia (Aspek Hukum Keluarga dan Bisnis)*, (Bandar Lampung: Seksi Penerbitan Fakultas Syari’ah IAIN Raden Intan Lampung Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame, 2014), h. 115

⁴³ Imam mustofa, *Fiqih Muamalah Kontemporer*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h. 26

berhala bukan karena najis tapi karena tidak ada manfaatnya.⁴⁴

c) Barang yang diperjualbelikan maupun alat tukarnya adalah suatu yang dapat diserahkan terimakan. Sebab sesuatu yang tidak dapat diserahkan terimakan dianggap sama saja dengan sesuatu yang tidak ada dan jual beli dengan cara demikian tidaklah sah.⁴⁵

d) Barang yang dijadikan objek transaksi merupakan hak milik secara sah, kepemilikan sempurna. Berdasarkan syarat ini maka tidak sah jual beli pasir ditengah padang, jual beli air laut yang masih di laut atau jual beli panas matahari, karena tidak adanya kepemilikan yang sempurna.

e) Barang yang diperjual belikan adalah barang yang bermanfaat.⁴⁶

f) Milik sendiri, tidaklah sah menjual barang orang lain dengan tidak seizin pemiliknya atau barang-barang yang baru akan menjadi miliknya.

3) Syarat sah *ijab qabul* antara lain:⁴⁷

a) Ijab dan qabul harus dilakukan oleh orang yang cakap hukum. Kedua belah pihak harus berakal, *mumayyiz*, tahu akan hak dan kewajibannya.

⁴⁴ Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), h. 72

⁴⁵ Saleh Al-Fauzan, *Fiqih Sehari-hari*, (Jakarta: Gema Insani Pers, 2005), h. 367-368

⁴⁶ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, (Bandung: Alma'arif, 1997), h. 52

⁴⁷ Imam Mustofa, *Fiqih Mu'amalah Kontemporer*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h. 27-

- b) Kesesuaian antara kabul dan ijab, baik dari sisi kualitas maupun kuantitas. Pembeli menjawab semua yang diutarakan penjual. Apabila pihak pembeli menjawab lebih dari ijab yang diungkapkan penjual, maka transaksi tetap sah. Sebaliknya apabila pembeli menjawab lebih singkat dari ijab yang diucapkan penjual, maka transaksi tidak sah.
- c) Ijab dan kabul dilakukan dalam suatu majelis, sekiranya para pihak yang melakukan transaksi hadir dalam suatu tempat secara bersamaan, atau berada dalam satu tempat yang berbeda, namun keduanya saling mengetahui.
- d) Ijab dan kabul harus dapat diterima oleh kedua belah pihak.⁴⁸

4. Macam-Macam Jual Beli

a. Menurut hukumnya

Menurut hukumnya Jumhur fuqaha' membagi jual beli kepada *shahih* dan *ghairu shahih* yakni:

- 1) Jual beli *shahih*, yakni jual beli yang disyariatkan menurut asal dan sifat-sifatnya terpenuhi rukun-rukun dan syarat-syaratnya tidak terkait dengan hak orang lain dan tidak ada hak khiyar di dalamnya. Jual beli *shahih* menimbulkan implikasi hukum, yaitu berpindah

⁴⁸ Khumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam di Indonesia (Aspek Hukum Keluarga dan Bisnis)*, (Bandar Lampung: Seksi Penerbitan Fakultas Syari'ah IAIN Raden Intan Lampung Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame, 2014), h. 119

kepemilikan, yaitu barang berpindah miliknya menjadi milik pembeli dan harga berpindah miliknya menjadi milik pembeli.⁴⁹

- 2) Jual beli *ghairu shahih*, yaitu jual beli yang tidak terpenuhi rukun dan syaratnya dan tidak mempunyai implikasi hukum terhadap objek akad, masuk kedalam kategori ini adalah jual beli *bathil* dan jual beli *fasid*, yakni:⁵⁰

- a) Jual beli *bathil*, yaitu jual beli yang tidak disyariatkan menurut asal dan sifatnya kurang salah satu rukun dan syaratnya. Misalnya jual beli yang dilakukan oleh orang yang tidak cakap hukum, seperti gila atau jual beli terhadap *mal ghairu mutaqawwin* (benda yang tidak dibenarkan memanfaatkannya secara sya'i), seperti bangkai dan narkoba.

Jual beli *bathil* ada beberapa macam, yakni:

- 1) Jual beli *ma'dum* (tidak ada bendanya), yakni jual beli yang dilakukan terhadap sesuatu yang tidak atau belum ada ketika akad.
- 2) Jual beli sesuatu yang tidak dapat diserahkan, Para ulama baik dari kalangan Hanafiyah, Malikiyah dan Syafi'iyah berpendapat, tidak sah melakukan jual beli terhadap sesuatu yang tidak dapat diserahkan, seperti

⁴⁹ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), h. 128

⁵⁰ Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah: Prinsip dan Implementasi Pada Sektor Keuangan Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h. 71

jual beli terhadap burung yang sedang terbang diudara dan ikan di laut.

- 3) Jual beli *gharar*, yakni jual beli yang mengandung tipuan. Jual beli mengandung tipuan adalah jual beli sesuatu yang tidak diketahui hasilnya, atau tidak bisa diserahterimakan, atau tidak diketahui hakikat dan kadarnya.⁵¹ Yang termasuk kedalam jual beli *gharar* adalah:

- (a) Jual beli *muhazabanah*, yakni jual beli sesuatu yang diketahui jumlahnya dengan sesuatu yang tidak diketahui jumlah atau harganya. Ini biasanya berlaku bagi buah-buahan yang masih dalam pelepahnya.⁵²

Jual beli seperti ini termasuk jual beli *gharar* karena tidak jelas kualitas dan kuantitasnya.

- (b) Jual beli *mulamasah* (jual beli dengan cara menyentuh barang) dan jual beli *munabazah* (jual beli dengan melempar barang).

Jual beli *mulamasah* adalah jual beli dengan cara menyentuh barang di tempat gelap tanpa bisa melihat jenis, bentuk dan kualitas barang. Apa yang disentuh itulah hak pembeli. Sedangkan *munabazah* (melempar) adalah jual beli dengan cara melempar barang yang

⁵¹ Idri, *Hadis Ekonomi: Ekonomi Dalam Perspektif Hadis Nabi*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2015), h. 159

⁵² Muhammad Sharif Chaudry, *Sistem Ekonomi Islam: Prinsip Dasar*, (Jakarta: Prenada Media, 2012), h. 126

akan dibeli. Mana barang yang terlempar itulah hak pembeli. Jika tidak ada satu pun barang yang terkena lempar, pembeli tidak mendapatkan apa-apa.

(c) Jual beli *thalaqi al-ruqan* dan jual beli *hakhir libad*, jual beli yang dilakukan dengan cara menghadang pedagang dari desa yang belum tahu harga pasaran.

(d) Jual beli *an-Najasy*, yakni jual beli yang dilakukan dengan cara memuji-muji barang atau menaikkan harga (penawaran) secara berlebihan terhadap barang dagangan (tidak bermaksud untuk menjual atau membeli), tetapi hanya dengan tujuan mengelabui orang.

4) Jual beli sesuatu yang najis dan menajiskan (*bay' al-najis* dan *bay' al-mutanajjis*).

Jual beli sesuatu yang najis dan menajiskan (*bay' al-najis* dan *bay' al-mutanajjis*). Seperti jual beli *khamr*, babi, bangkai dan darah. Karena barang-barang tersebut bukan termasuk kategori harta benda (*mal*) dan ini dilarang. Beberapa pendapat dari Imam Hanafi (seperti yang diungkapkan oleh Wahbah Zuhaili dalam *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*) membolehkan jual beli binatang buas seperti jual beli anjing, macan tutul singa, srigala dan kucing karena binatang-binatang tersebut masuk dalam kategori

(*mal*) harta benda. Akan tetapi penjualan binatang-binatang tersebut harus disertai dengan syarat, bahwa binatang tersebut benar-benar dimanfaatkan dengan baik sesuai ajaran syariat.⁵³

- 5) Jual beli *urbun* (persekot), yaitu jual beli yang dilakukan dengan perjanjian pembeli menyerahkan uang seharga barang jika ia setuju jual beli dilaksanakan, akan tetapi jika ia membatalkan jual beli, uang yang telah dibayarkan menjadi hibah bagi penjual. Dalam hal ini Jumhur ulama berpendapat jual beli dengan cara ini terlarang dan tidak sah. Sementara menurut Hanafiyah, jual beli ini fasid.⁵⁴

6) Jual beli air

Salah satu syarat jual beli adalah benda yang diperjualbelikan merupakan milik sendiri. Tidak sah melakukan jual beli terhadap benda-benda yang dimiliki secara bersama oleh seluruh umat manusia, seperti air, udara, dan tanah. Seluruh benda seperti air laut, sungai dan sumur umum tidak boleh diperjualbelikan karena tergolong *mal mubah* (benda-benda bebas).⁵⁵

- b) Jual beli *fasid*, jual beli yang disyariatkan menurut asalnya.

Namun sifatnya tidak, misalnya jual beli itu dilakukan oleh

⁵³ Ika Yunia Fauzi, dan Abdul Kadir Riyadi, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam: Prespektif Maqashid al-Syari'ah*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2015), h. 248

⁵⁴ Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah: Prinsip dan Implementasinya Pada Sektor Keuangan Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h. 79

⁵⁵ *Ibid*, h. 80

orang yang pantas (*ahliyah*) atau jual beli benda yang dibolehkan atau memanfaatkannya. Namun, terdapat hal atau sifat yang tidak disyariatkan pada jual beli tersebut yang mengakibatkan jual beli itu menjadi rusak.⁵⁶

Jual beli *fasid* terdiri dari beberapa bentuk:⁵⁷

- 1) Jual beli *majhul* (tidak jelas barang yang diperjualbelikan).
- 2) Jual beli yang digantungkan kepada syarat dan jual beli yang digantungkan kepada masa yang akan datang.
- 3) Jual beli barang yang ghaib atau tidak terlihat ketika akad.
- 4) Menjual dengan pembayaran yang ditunda dan membeli dengan harga tunai (*bai' ajal*).
- 5) Jual beli anggur dengan tujuan untuk membuat *khamar*, ataupun jual beli pedang dengan tujuan untuk membunuh seseorang.
- 6) Melakukan dua akad jual beli sekaligus dalam satu akad atau ada dua syarat dalam satu akad jual beli.

b. Menurut objeknya

1) Jual beli *Sharf*

Sharf berarti jual beli antara satu mata uang dengan mata uang yang lain, baik sejenis maupun tidak sejenis. Menurut 'Abd al-Rahman al-Juzayri, *Sharf* adalah jual beli emas dengan emas, perak dengan perak, atau jual beli salah satunya dengan yang lainnya.

⁵⁶ Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2005), h. 108

⁵⁷ Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah: Prinsip dan Implementasinya Pada Sektor Keuangan Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h. 80-81

Sharf ini merupakan jual beli pada umumnya, sehingga rukun jual beli diberlakukan pula dalam *Sharf*.⁵⁸

2) Jual beli *al-Muqayadhah*

Muqayadhah yakni jual beli yang dilangsungkan dengan cara saling menukar harta dengan harta (*barter*).⁵⁹

3) Jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam janji

Yaitu jual beli *salam* (pesanan) atau jual beli barang secara tangguh dengan harga yang dibayarkan dimuka, atau dengan kata lain jual beli dimana harga dibayarkan dimuka sedangkan barang dengan kriteria tertentu diserahkan pada waktu tertentu.⁶⁰

c. Menurut Subjeknya (pelaku akad)

1) Akad jual beli dengan lisan

Akad jual beli yang dilakukan dengan lisan adalah akad yang dilakukan dengan mengucapkan *ijab qabul* secara lisan. Bagi orang yang bisu diganti dengan isyarat karena isyarat merupakan pembawaan alami dalam menampakkan kehendaknya.⁶¹

2) Akad jual beli dengan perantara

Akad jual beli yang dilakukan dengan melalui utusan, perantara, tulisan atau surat menyurat sama halnya dengan *ijab qabul*

⁵⁸ Yadi Janwari, *Lembaga Keuangan Syariah*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2015), h. 50

⁵⁹ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), h. 112

⁶⁰ Ghufron A. Masadi, *Fiqh Mu'amalah Kontekstual*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), h. 143

⁶¹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Nur Hasanuddin, Terj, "Fiqh Sunnah", Jilid 4, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, Cet. Ke-1, 2006), h. 123

dengan ucapan. Jual beli ini dilakukan antara penjual dan pembeli yang tidak berhadapan dalam satu majelis.

3) Akad jual beli dengan perbuatan

Jual beli dengan perbuatan (saling memberikan) atau dikenal dengan istilah *mu'athah* yaitu mengambil dan memberikan barang tanpa ijab qabul. Seperti, seseorang mengambil rokok yang sudah bertuliskan label harganya. Jual beli demikian dilakukan tanpa sighat ijab qabul antara penjual dan pembeli, menurut sebagian Syafi'iyah yang dikutip dalam bukunya Hendi Suhendi yang berjudul Fiqh Muamalah, bahwa hal ini dilarang sebab ijab qabul sebagai rukun jual beli, tetapi menurut Mazhab Hanafiah membolehkan karena ijab qabul tidak hanya berbentuk perkataan tetapi dapat berbentuk perbuatan pula yaitu saling memberi (penyerahan barang dan penerimaan uang).

5. Jual beli yang dilarang

Dalam pembagian macam-macam jual beli yang dilarang dalam syariat Islam. Wahbah Az-Zuhaili membagi atas beberapa bagian sebagai berikut:⁶²

- a. Jual beli yang dilarang karena *ahliyah* atau ahli akad (penjual dan pembeli), antara lain:

⁶² Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, jilid 5, Penerjemah : Abdul Hayyie al-Kattani, (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 500

1) Orang gila

Ulama fikih sepakat bahwa jual beli orang yang gila tidak sah. Begitu pula sejenisnya, seperti orang mabuk, pingsan dan dibius.

2) Anak kecil

Ulama fiqih sepakat bahwa jual beli anak kecil (belum *mumayyiz*) dipandang tidak sah, kecuali dalam perkara-perkara ringan dan sepele. Menurut ulama Syafi'iyah jual beli anak *mumayyiz* yang belum *baliqh*, tidak sah sebab tidak ada ahliyah (kecakapan hukum).

Adapun menurut ulama Malikiyah, Hanafiyah dan Hanabilah, jual beli anak kecil dipandang sah jika diizinkan oleh walinya.

3) Orang buta

Jumhur ulama sepakat bahwa jual beli yang dilakukan orang buta sah jika diterangkan sifat barang yang mau dibeli, karena adanya rasa rela. Sedangkan menurut ulama Syafi'iyah tanpa diterangkan sifatnya dipandang *bathil* dan tidak sah, karena ia dianggap tidak bisa membedakan barang yang jelek dan baik walaupun diterangkan sifatnya tetap dipandang sah.

4) Jual beli terpaksa

Menurut ulama Hanafiyah, hukum jual beli orang yang terpaksa adalah ditangguhkan (*mauqud*), sampai rela (hilang rasa

terpaksa). Menurut ulama Malikiyah, tidak lazim baginya ada *khiyar*. Adapun menurut ulama Syafi'iyah dan Hanabilah, jual beli tersebut tidak sah sebab tidak ada keridhaan saat akad.⁶³

5) *Fudhuli*

Jual beli *fudhul* yaitu beli milik orang lain tanpa seizin pemeliknya, oleh karena itu menurut para ulama jual beli yang demikian dipandang tidak sah, sebab dianggap mengambil hak orang lain (mencuri).

6) Jual beli terhadap orang yang terhalang (sakit, bodoh, atau pemboros)

Jual beli yang dimaksud ialah jual beli yang dilakukan oleh orang-orang yang terhalang baik karena ia sakit maupun karena kebodohnya dipandang tidak sah, sebab ia dipandang tidak mempunyai kepandaian.

7) Jual beli mulja'

Jual beli yang dilakukan oleh orang yang sedang dalam bahaya. Jual beli yang demikian menurut kebanyakan ulama tidak sah, karena dipandang tidak normal sebagaimana yang terjadi pada umumnya.

b. Jual beli yang dilarang sebab *sighat*

Ulama fiqh telah sepakat atas sahnya jual beli yang didasarkan pada keridhaan diantara pihak yang melakukan akad, ada kesesuaian

⁶³ Rahmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h.94

antara ijab dan qabul, berada disatu tempat dan tidak terpisah oleh suatu pemisah. Beberapa jual beli yang dianggap tidak sah atau masih diperdebatkan oleh para ulama adalah sebagai berikut:

1) Jual beli *mu'athah*

Jual beli yang telah disepakati oleh pihak (penjual dan pembeli) berkenaan dengan barang maupun harganya tetapi tidak memakai ijab kabul, jual beli seperti ini dipandang tidak sah karena tidak memenuhi syarat dan rukun jual beli.⁶⁴

2) Jual beli tidak bersesuaian antara ijab dan kabul

Hal ini dipandang tidak sah menurut kesepakatan ulama, akan tetapi jika lebih baik, seperti meningkatkan harga, menurut ulama Hanafiyah membolehkannya, sedangkan ulama Syafi'iyah menganggapnya tidak sah.⁶⁵

3) Jual beli *munjiz*

Jual beli yang digantungkan dengan suatu syarat tertentu atau ditangguhkan pada waktu yang akan datang. Jual beli seperti ini dipandang tidak sah, karena dianggap bertentangan dengan syarat dan rukun dalam jual beli.

⁶⁴ Khumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam di Indonesia (Aspek Hukum Keluarga dan Bisnis)*, (Bandar Lampung: Seksi Penerbitan Fakultas Syari'ah IAIN Raden Intan Lampung Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame, 2014), h 124

⁶⁵ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, jilid 5, Penerjemah : Abdul Hayyie al-Kattani, (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 97

4) Jual beli *najasyi*

Jual beli yang dilakukan dengan cara menambah atau melebihi harga temannya, dengan maksud mempengaruhi orang agar orang itu mau membeli barang kawannya.

5) Jual beli dibawah harga pasar

Jual beli yang dilaksanakan dengan cara menemui orang-orang (petani) desa sebelum mereka masuk pasar dengan harga semurah-murahnya sebelum tahu harga pasar, kemudian ia menjualnya dengan harga setinggi-tingginya.

6) Menjual diatas penjualan orang lain

Maksudnya bahwa menjual barang kepada orang lain dengan cara menurunkan harga, sehingga orang itu mau membeli barangnya.

7) Menawar barang yang sedang ditawar oleh orang lain

Misalnya seseorang berkata: “jangan terima tawaran orang itu nanti aku akan membeli dengan harga yang lebih tinggi”. Jual beli seperti ini juga dilarang oleh agama sebab dapat menimbulkan persaingan tidak sehat dan dapat mendatangkan perselisihan antara pedagang.

c. Jual beli yang dilarang karena objek jual beli (barang yang diperjualbelikan), antara lain:

1) Jual beli *gharar*

Jual beli barang yang mengandung kesamaran. Menurut Sayyid Sabiq yang dimaksud dengan jual beli *gharar* ialah jenis jual

beli yang mengandung (kemiskinan) atau (spekulasi) atau (permainan taruhan). Jual beli yang demikian tidak sah.

2) Jual beli barang yang tidak dapat diserahkan

Jual beli yang barangnya tidak dapat diserahkan maksudnya yaitu jual beli barang yang tidak dapat diserahkan, seperti burung yang ada di udara dan ikan yang ada di air dipandang tidak sah, karena jual beli seperti ini dianggap tidak ada kejelasan yang pasti.

3) Jual beli *mahjul*

Jual beli barang yang tidak jelas, misalnya jual beli singkong yang masih ditanah, jual beli buah-buahan yang baru berbentuk bunga dan lain-lain.

4) Jual beli sperma binatang

Seperti mengawinkan seekor sapi jantan dengan betina agar mendapat keturunan yang baik adalah haram.

5) Jual beli barang yang dihukumkan najis oleh agama (Al-Quran)

Jual beli barang-barang yang sudah jelas hukumnya oleh agama seperti arak, babi dan berhala adalah haram.

6) Jual beli anak kambing yang masih berada dalam perut induknya

Jual beli yang demikian haram, sebab barangnya belum ada dan belum tampak jelas.

7) Jual beli *muzabanah*

Jual beli buah yang basah dengan buah yang kering, misalnya jual beli padi kering dengan bayaran padi yang basah, sedangkan ukurannya sama, sehingga akan merugikan pemilik padi kering.

8) Jual beli *muhaqallah*

Jual beli tanam-tanaman yang masih di ladang atau kebun atau disawah. Jual beli seperti ini dilarang dalam agama karena mengandung unsur riba didalamnya (untung-untungan).

9) Jual beli *mukhadharah*

Jual beli buah-buahan yang belum pantas untuk dipanen, misalnya rambutan yang masih hijau, mangga yang masih kecil dan lain sebagainya.

10) Jual beli *mulammasah*

Jual beli secara sentuh menyentuh, misalnya seseorang menyentuh sehelai kain dengan tangan atau kaki (memakai), maka berarti ia dianggap telah membeli kain itu.

11) Jual beli *munabadzah*

Jual beli secara lempar-melempar, misalnya seseorang berkata: “lemparkanlah kepadaku appa yang ada padamu, nanti kulemparkan pula kepadamu apa yang ada padaku, setelah terjadi lempar-melempar maka terjadilah jual beli. Jual beli seperti ini juga dilarang oleh agama, karena mengandung tipua dan merugikan salah satu pihak.

B. Al-Qard

1. Pengertian *Al-Qard*

Masalah utang piutang dalam hukum Islam dikenal dengan istilah *Al-Qard*, yang menurut bahasa berarti “potongan”, dikatakan demikian karena *Al-Qard* merupakan potongan dari harta *muqridh* (orang yang membayar) yang dibayarkan kepada *muqtaridh* (yang diajak akad *Qard*).⁶⁶

Menurut Azhar Basyir, utang piutang adalah memberikan harta kepada orang lain untuk dimanfaatkan guna untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhannya dengan maksud akan membayar kembali pada waktu mendatang.⁶⁷ Menurut Imam Syafe’i, hutang piutang dalam arti bahasa (etimologi) berarti potongan. Sedangkan dalam arti istilah (terminologi) adalah sesuatu yang diutangkan dan disebut juga dengan *iqrad* atau salaf, yang berarti suatu pemberian dan pengalihan hak milik, dengan syarat harus ada penggantinya yang serupa (sama).⁶⁸

Dengan kata lain *Al-Qard* adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali atau dalam istilah lain meminjam tanpa mengharapkan imbalan. Dalam literatur fiqh klasik, *Al-Qard* dikategorikan dalam *aqad tathawwu’i* atau akad saling membantu dan bukan transaksi komersial.⁶⁹

Kata *qardh* ini kemudian diadopsi menjadi *credo* (romawi), *credit* (Inggris), dan *kredit* (Indonesia). Objek dari pinjaman *qardh* biasanya adalah

⁶⁶ Rahmad Syafe’i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2013), h. 151

⁶⁷ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Islam, Utang-Piutang, Gadai*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000), h. 56

⁶⁸ *Ibid*, h. 59

⁶⁹ M. Syafe’i Antoni, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Pers, 2001), h. 131

uang atau alat tukar lainnya yang merupakan transaksi pinjaman murni tanpa bunga ketika peminjam mendapatkan uang tunai dari pemilik dana, dan hanya wajib mengembalikan pokok utang pada waktu tertentu dimasa yang akan datang.⁷⁰

Dari penjelasan diatas, dapat dipahami bahwa definisi-definisi yang secara redaksional berbeda tersebut mempunyai makna yang sama. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa *Qard* (utang-piutang) adalah pemberian pinjaman oleh kreditur (pemberi pinjaman) kepada pihak lain dengan syarat (penerima pinjaman) akan mengembalikan pinjaman tersebut pada waktu yang telah ditentukan berdasarkan perjanjian dengan jumlah yang sama ketika pinjaman itu diberikan.

Para ulama sepakat bahwa *Qard* boleh dilakukan atas dasar bahwa manusia adalah makhluk sosial yang tidak bisa hidup tanpa pertolongan dan bantuan saudaranya. Oleh karena itu, pinjam meminjam sudah menjadi satu bagian dari kehidupan di dunia dan Islam adalah agama yang sangat memperhatikan kebutuhan umatnya.

Disamping itu, hukum *qard* berubah sesuai dengan keadaan, cara dan proses akadnya. Adakalanya hukum *qard* boleh, kadang wajib, makruh, dan haram. Jika orang yang berhutang adalah orang yang mempunyai kebutuhan sangat mendesak, sedangkan orang yang dihutangi orang kaya, maka orang yang kaya itu wajib memberinya utang. Jika pemberi utang mengetahui bahwa pengutang akan menggunakan uangnya untuk berbuat maksiat atau

⁷⁰ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), h. 46

perbuatan yang makruh maka memberi utang hukumnya haram atau maruh sesuai dengan kondisinya. Jika seseorang yang berhutang bukan karena adanya kebutuhan yang mendesak, tetapi untuk menambah modal perdagangannya maka hukumnya mubah. Seseorang boleh berutang jika dirinya yakin dapat membayarnya, seperti jika ia mempunyai harta yang dapat diharapkan dan mempunyai niat menggunakannya untuk membayar utangnya. Jika hal ini tidak ada pada diri pengutang maka ia tidak boleh berutang.

Al-Qard disyariatkan dalam Islam bertujuan untuk mendatangkan kemaslahatan bagi manusia. Seseorang yang mempunyai harta dapat membantu mereka yang membutuhkan, akad utang piutang dapat menumbuhkan rasa kepedulian terhadap sesama. Mumpuk rasa kasih sayang terhadap sesama manusia dengan menguraikan kesulitan yang dihadapi orang lain.⁷¹

2. Dasar Hukum *Qard*

Dalam kehidupan sehari-hari, manusia tidak lepas dari adanya sifat saling membutuhkan antara satu dengan yang lainnya. Firman Allah dalam QS Al-Maidah (5) ayat 2:

وَلَا تَعَاوُنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

Artinya: dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertaqwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksanya. (QS Al-Maidah (5):2)⁷²

⁷¹ Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah: Prinsip dan Implementasinya Pada Sektor Keuangan Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h. 231-232

⁷² Departemen Agama, *Alquran dan Terjemahannya*, (Jakarta: J-ART, 2004), h. 106

QS Al-Hadid (57) ayat 11:

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفُهُ لَهُ وَأَكْبَرُ كَرِيمًا



Artinya: siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, maka Allah akan melipatgandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, dan dia akan memperoleh pahala yang banyak. (QS Al-Hadid (57): 11).⁷³

Seruan untuk “meminjamkan kepada Allah Swt.”, artinya untuk membelanjakan harta di jalan Allah Swt. Hal ini juga selaras dengan seruan kita untuk “meminjamkan kepada sesama manusia”, sebagai bagian dari kehidupan masyarakat.⁷⁴

Terkait *Qard* para ulama telah menyepakati bahwa *Qard* boleh dilakukan. Kesepakatan ulama ini didasarkan pada tabiat manusia yang tidak bisa hidup tanpa pertolongan dan bantuan saudaranya. Tidak ada seorang pun yang memiliki segala barang yang ia butuhkan. Oleh karena itu, pinjam-meminjam sudah jadi bagian dari kehidupan didunia ini. Islam adalah agama yang sangat memerhatikan segenap kebutuhan umatnya.

3. Rukun dan Syarat *Qard*

Rukun *Qard* menurut ulama Hanafiyah adalah ijab dan kabul.

Sementara itu menurut jumhur ulama rukun *qard* ada tiga, yaitu:⁷⁵

⁷³ *Ibid.*, h. 538

⁷⁴ Darsono, dkk, *Perbankan Syariah di Indonesia: Kelembagaan dan Kebijakan Serta Tantangan ke Depan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), h. 231

⁷⁵ Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah: Prinsip dan Implementasinya Pada Sektor Keuangan Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h. 232

- a. Dua orang yang berakad yang terdiri dari: *muqrid* (yang memberikan utang) dan *muqtaridh* (orang yang berhutang)
- b. *Qardh* (barang yang dipinjamkan)
- c. *Sighat ijab* dan *qabul*.

Menurut M. Ali Hasan bahwa rukun utang-piutang itu ada tiga, yaitu:⁷⁶

- a. Lafaz (*ijab qabul*)
- b. Yang berhutang piutang
- c. Barang yang dihutangkan

Dari beberapa pendapat diatas pada dasarnya sama, dan tiap-tiap unsur atau rukun tersebut harus memenuhi beberapa syarat yaitu:

- a. Dua pihak yang berakad, yakni orang yang berhutang (*muqtaridh*) dan orang yang membeli pinjaman (*muqaridh*), disyaratkan:
 - 1) *Baligh*, berakal cerdas dan merdeka, tidak dikenakan hajru. Artinya cakap bertindak hukum.
 - 2) *Muqaridh* adalah orang yang mempunyai kewenangan dan kekuasaan untuk melakukan akad *tabaru'*. Artinya harta yang diutangkan merupakan miliknya sendiri.
- b. Harta yang diutangkan (*qardh*)
 - 1) Harta yang diutangkan merupakan *mal misliyat* yakni harta yang dapat ditakar (*makilat*), harta yang dapat ditimbang (*mauzunat*),

⁷⁶ Ali Hasan, *Transaksi Dalam Islam*, (Jakarta:Usaha Kami, 1996), h. 243

harta yang diukur (*zari'iyat*), harta yang dapat dihitung (*addiyat*).

Ini merupakan pendapat ulama Hanafiyah.

- 2) Setiap harta yang dapat dilakukan jual beli salam, baik itu jenis harta *makilat, mauzunat, addiyat*. Ini merupakan pendapat ulama Malikiyah, Syafiliyah, Hanabilah. Atas dasar ini tidak sah mengutangkan manfaat (jasa). Ini merupakan pendapat mayoritas *fuqaha*.
- 3) *Al-Qabad* atau penyerahan. Akad utang piutang tidak sempurna kecuali dengan adanya serah terima. Karena di dalam akad *qardh* ada *tabarru'*. Akad *tabarru'* tidak akan sempurna kecuali dengan serah terima.
- 4) Utang piutang tidak memunculkan keuntungan bagi *muqaridh* (orang yang mengutangkan).
- 5) Utang itu menjadi tanggung jawab *muqtarid* (orang yang berhutang). Artinya orang yang berhutang mengembalikan utangnya dengan harga atau nilai yang sama.
- 6) Barang itu bernilai harta dan boleh dimanfaatkan dalam Islam
- 7) Harta yang diutangkan diketahui, yakni diketahui kadar dan sifatnya.
- 8) Pinjaman boleh secara mutlak, atau ditentukan dengan batas waktu.

c. *Sighat dan ijab qabul*

Akad *qardh* dinyatakan sah dengan adanya ijab dan qabul berupa lafal *qardh* atau yang sama pengertiannya, seperti “aku memberimu

uang” atau “aku mengutangimu”, demikian pula qabul sah dengan semua lafal yang menunjukkan kerelaan, seperti “aku berhutang”, atau “aku menerima”, atau “aku ridha” dan lain sebagainya.

4. Hikmah dan Manfaat *Qardh*

1. Hikmah *Qardh*

Hikmah disyariatkannya *qardh* yaitu sebagai berikut:⁷⁷

- a. Melaksanakan kehendak Allah agar kaum Muslimin saling menolong dalam kebaikan dan ketaqwaan.
- b. Memperkuat ikatan ukhwa (persaudaraan) dengan cara mengulurkan bantuan kepada orang yang membutuhkan dan mengalami kesulitan dan meringankan beban orang yang tengah dilanda kesulitan.

2. Manfaat *Qardh*

Manfaat *qardh* dalam praktik perbankan syariah banyak sekali diantaranya sebagai berikut:⁷⁸

- a. Memungkinkan nasabah yang sedang dalam kesulitan mendesak untuk mendapatkan talangan jangka pendek.
- b. *Al-Qardh al-Hasan* juga merupakan salah satu ciri pembeda antara bank syariah dan bank konvensional yang didalamnya terkandung misi sosial, disamping misi komersial.
- c. Adanya misi sosial kemasyarakatan ini akan meningkatkan citra baik dan meningkatkan loyalitas masyarakat terhadap bank syariah.

⁷⁷ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2012), h. 333

⁷⁸ *Ibid*, h. 335

C. Riba

1. Pengertian Riba

Riba secara bahasa bermakna *ziyadah* (tambahan), dalam pengertian lain secara linguistik, riba juga berarti tumbuh dan membesar. Adapun menurut istilah teknis riba berarti pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara batil.⁷⁹ Kata riba dalam Al-Quran digunakan dengan bermacam-macam arti, seperti: tumbuh, tambah, menyuburkan serta menjadi besar dan banyak. Secara umum riba berarti bertambah, baik secara kualitatif maupun kuantitatif.⁸⁰

Ada beberapa pendapat dalam menjelaskan riba, namun secara umum ditegaskan bahwa riba adalah pengambilan tambahan, baik dalam transaksi jual-beli maupun pinjam-meminjam secara batil atau bertentangan dengan prinsip muamalah dalam Islam.⁸¹

Di lain pihak, Imam Nawawi menjelaskan bahwa salah satu bentuk riba yang dilarang dalam Al-Quran dan As-Sunnah adalah tambahan atas harta pokok karena ada unsur waktu.⁸² Diantara tanda keadilan adalah haramnya bermuamalah dengan riba. Nabi saw menilai riba termasuk dalam “tujuh mubiqat” yaitu membinasakan perorangan dan masyarakat, dunia dan akhirat. Nabi melaknat pemakan dan pemberi riba, penulis dan dua orang saksinya dengan berkata “mereka semuanya sama” dalam berbuat dosa,

⁷⁹ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), h. 37

⁸⁰ Ruslan Abdul Ghofur Noor, *Konsep Distribusi Dalam Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), h. 77

⁸¹ Efa Rodiah Nur, “Riba dan Gharar”, *Al-Adalah*. Vol. XII No 3, Juni 2015, h. 649. Tersedia di: <http://www.ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah/article/view/247/390>

⁸² Nurul Huda, *Ekonomi Makro Islam Pendekatan Teoritis*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2008), h. 339

meskipun berbeda tingkatan dosanya.⁸³ Itu tidak lain karena riba adalah tindakan memakan harta orang lain tanpa jerih payah dan resiko, kemudahan yang diperoleh orang kaya atas kesedihan orang miskin, serta merusak semangat manusia untuk bekerja mencari uang.

Pada zaman *jahiliyah*, praktik riba yang terjadi berupa transaksi pinjam meminjam dengan suatu perjanjian, peminjam bersedia mengembalikan jumlah pinjaman pada waktu yang telah disepakati berikut tambahan. Pada saat jatuh tempo si peminjam (kreditor) meminta jumlah pinjaman yang dulu diberikan kepada peminjam (debitor). Jika debitor mengatakan belum sanggup membayar, kreditor akan memberikan tenggang waktu dengan syarat, debitor bersedia membayar sejumlah tambahan diatas pinjaman pokok tadi.⁸⁴ Sebelum turun ayat pelarangan riba, transaksi ribawi telah terbiasa dilakukan oleh masyarakat Arab, baik di Thaif, Mekah, maupun Madinah.⁸⁵

Secara hukum fiqh (juristikal) riba mengandung pengertian:

- a) Tambahan uang yang diberikan ataupun diambil dimana pertukaran uang tersebut dalam bentuk uang yang sama (*dollar-for-dollar exchange*, misalnya)
- b) Tambahan nilai uang pada satu sisi yang sedang melakukan kontrak tat kala komoditas yang didagangkan secara barter itu pada jenis yang

⁸³ Yusuf Qardhawi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, (Jakarta: Gema Insani, 1997), h. 183

⁸⁴ Nurul Huda, *Ekonomi Makro Islam Pendekatan Teoritis*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2008), h. 240

⁸⁵ Adiwarman Aswar Karim, *Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2011), h. 70

serupa. Beberapa *fuqaha* mempergunakan istilah ini dalam istilah yang umum dengan memasukkan semua bentuk transaksi yang tidak halal.⁸⁶

2. Dasar Hukum Riba

a. Al-Quran

QS Al-Baqarah ayat 275:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ



Artinya: orang-orang yang memakan (mengambil) riba, tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan lantaran tekanan penyakit gila. Hal itu karena mereka mengatakan bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barang siapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barang siapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal didalamnya.⁸⁷

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُمْ مُّؤْمِنِينَ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ



Artinya: wahai orang-orang yang beriman, bertaqwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang beriman. Jika kamu tidak melaksanakannya, maka umumkanlah perang dari Allah dan

⁸⁶ Mustaq Ahmad, *Etika Bisnis dalam Islam*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001), h. 127

⁸⁷ Departemen Agama, *Alquran dan Terjemahannya*, (Jakarta: J-ART, 2004), h. 47

Rasul-Nya. Tetapi jika kamu bertaubat, maka kamu berhak atas pokok hartamu. Kamu tidak berbuat zalim (merugikan) dan tidak dizalimi (dirugikan). (QS Al-Baqarah: 278-279)⁸⁸

b. As-Sunnah

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (الدَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَزَنًا بِوَزْنٍ مِثْلًا مِثْلًا، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَزَنًا بِوَزْنٍ مِثْلًا مِثْلًا، فَمَنْ زَادَ أَوْ اسْتَرَأَ فَهُوَ رِبَا). رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

Artinya: Dari Abu Hurairah r.a dia berkata, “Rasulullah bersabda, (boleh menjual/menukar) emas dengan emas dengan timbangan yang sama dan sebanding, perak dengan perak dengan timbangan yang sama dan sebanding. Apabila melebihkannya atau mintak dilebihkan, maka itulah riba”.(Hadis riwayat Muslim)⁸⁹

وَعَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (الدَّهَبُ بِالذَّهَبِ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ، وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ، وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ، مِثْلًا بِمِثْلٍ، سَوَاءً بِسَوَاءٍ، يَدًا بِيَدٍ، فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ فَبَيْعُوهَا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ). رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

Artinya: “Dari Ubadah bin ash-Shamit r.a, dia berkata, “:Rasulullah SAW bersabda, (Boleh menjual atau menukar) emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, sya’ir dengan sya’ir, kurma dengan kurma dan garam dengan garam, (dengan syarat) semuanya harus sama sebanding dan kontan. Dan apabila jenisnya berbeda maka juallah sesuai kehendak kalian dengan syarat tunai”.⁹⁰

3. Sebab- Sebab Haramnya Riba

Sebab-sebab diharamkannya riba diantara sebagai berikut, yaitu:

- a. Karena Allah dan Rasul-Nya melarang atau mengharamkannya.
- b. Karena riba menghendaki pengambilan harta orang lain dengan tidak ada imbangannya, seperti seseorang menukarkan uang kertas Rp. 10.000,00

⁸⁸ *Ibid.*, h. 47

⁸⁹ Al- Hafidz Ibnu Hajjar Al-Asqalani, Terjemahan Bulughul Maram, Jeddah: Al-Thoba'ah Wal-Nashar Al-Tauzi'. t. Th, h. 402

⁹⁰ *Ibid.*, h. 401

dengan uang recehan senilai Rp. 9.950,00 maka uang senilai Rp. 50,00 tidak ada imbangannya, maka uang senilai Rp. 50,00 adalah riba.

- c. Dengan melakukan riba, orang tersebut menjadi malas berusaha yang sah menurut syara'. Jika riba sudah mendarah daging pada seseorang, orang tersebut lebih suka berternak uang karena ternak uang akan mendapatkan keuntungan yang lebih besar daripada dagang dan dikerjakan tidak dengan susah payah
- d. Riba menyebabkan putusnya perbuatan baik terhadap sesama manusia dengan cara hutang-piutang atau menghilangkan faedah hutang-piutang sehingga riba lebih cenderung memeras orang miskin daripada menolong orang miskin.⁹¹

4. Macam-Macam Riba

Secara garis besar, riba dikelompokkan menjadi dua. Masing-masing adalah riba utang-piutang dan riba jual beli. Kelompok pertama terbagi lagi menjadi *riba qardh* dan *riba jahiliyah*. Adapun kelompok kedua, riba jual beli terbagi menjadi *riba fadhl* dan riba nasi'ah.⁹²

a. Riba *qardh*

Suatu tambahan atau kelebihan yang telah disyaratkan dalam perjanjian antara pihak pemberi pinjaman dan peminjam. Dalam perjanjian disebutkan bahwa pihak pemberi pinjaman meminta adanya

⁹¹ Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), h. 58-61

⁹² Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), h. 41

tambahan sejumlah tertentu kepada pihak peminjam pada saat peminjam mengembalikan pinjamannya.⁹³

Suatu manfaat atau tingkat kelebihan tertentu yang disyaratkan terhadap yang berhutang (*muqtaridh*)

b. Riba *jahiliyyah*

Riba yang timbul karena adanya keterlambatan pembayaran dari si peminjam sesuai dengan waktu pengembalian yang telah diperjanjikan. Peminjam akan membayar dengan jumlah tertentu yang jumlahnya melebihi jumlah uang yang telah dipinjamnya apabila peminjam tidak mampu membayar pinjamannya sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati. Kelebihan atas pokok pinjaman ini ditulis dalam perjanjian sehingga mengikat pada pihak peminjam.⁹⁴

c. Riba *fadhhl*

Yaitu jual beli atau tukar-menukar terhadap suatu barang dengan zatnya yang sama tetapi kualitasnya yang berbeda sehingga satu kilogram benda bersedia untuk ditukar dengan dua kilogram yang lainnya karena yang satu kilogram itu lebih bermutu.⁹⁵ dengan kata lain *riba fadhhl* adalah pertukaran antar barang sejenis dengan kadar atau takaran yang berbeda, sedangkan barang yang dipertukarkan itu termasuk dalam jenis barang ribawi.

⁹³ Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), h. 12

⁹⁴ *Ibid.*, h. 13

⁹⁵ Hussein Bahreisj, *Pedoman Fiqih Islam*, (Surabaya: Al-Ikhlas, 1981), h. 169

d. *Riba Nasi'ah*

Merupakan pertukaran antara jenis barang ribawi yang satu dengan yang lainnya. Pihak satu akan mendapatkan barang yang jumlahnya lebih besar disebabkan adanya perbedaan waktu dalam penyerahan barang tersebut. Penerima barang akan mengembalikan dengan kualitas yang lebih tinggi karena penerima barang akan mengembalikan dengan kualitas yang lebih tinggi karena penerima barang akan mengembalikan barang tersebut dalam waktu yang akan datang.⁹⁶

5. Hikmah Dilarangnya Riba

Beberapa hikmah dilarangnya riba yaitu sebagai berikut:

- a. Allah SWT tidak mengharamkan sesuatu yang baik dan bermanfaat bagi manusia, tetapi hanya mengharamkan apa yang sekiranya dapat membawa kerusakan baik individu maupun masyarakat.
- b. Cara riba merupakan jalan usaha yang tidak sehat, karena keuntungan yang diperoleh si pemilik dana bukan merupakan hasil pekerjaan atau jerih payahnya.
- c. Riba dapat menyebabkan krisis akhlak dan rohani. Orang yang meribakan uang atau barang akan kehilangan rasa sosialnya, egois
- d. Riba dapat menimbulkan kemasalan bekerja, hidup dari mengambil harta orang lain yang lemah. Cukup duduk di atas meja, orang lain yang memeras keringatnya.

⁹⁶ Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), h. 15

- e. Riba dapat mengakibatkan kehancuran. Banyak orang-orang yang kehilangan harta benda dan akhirnya menjadi fakir miskin.⁹⁷

B. Tinjauan Pustaka

Penelitian terdahulu terkait dengan topik skripsi Jual Beli Gaji Buruh dalam Tinjauan Hukum Islam, yaitu dari penelitian sebagai berikut:

1. Penelitian terdahulu dengan judul skripsi “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Tukar Menukar Uang (Studi Kasus di Desa Panjungan Pati Kabupaten Pati).” yang ditulis oleh Rifki Nur Avita, penulis menarik kesimpulan bahwa transaksi tukar-menukar diperbolehkan dalam hukum Islam. Akad yang diterapkan dalam transaksi tersebut adalah akad *ijarah ‘alaa al-a’maal ijarah*. Selain itu terdapat beberapa faktor yang menjadi alasan diperbolehkannya transaksi tersebut. Pertama, tambahan tersebut merupakan upah atas susahny mendapatkan uang pecahan. Kedua, karena mengandung kemaslahatan yang besar didalamnya, yaitu kemaslahatan dalam hal bermuamalah untuk memenuhi hidupnya. Ketiga, praktik tukar uang tersebut tercermin sebagai kebaikan, yakni terdapat unsur saling tolong menolong antara penyedia jasa dengan pengguna jasa (konsumen). Keempat, praktik tukar menukar uang tersebut merupakan salah satu bentuk kecil ekonomi rakyat, dimana rakyat memanfaatkan sumber daya yang telah dikuasainya. Kelima, adanya praktik tukar menukar uang pecahan tersebut lebih

⁹⁷Judgeagisti, *Hikmah Dibalik Larangan Riba*, [https://judgeagisti.wordpress.com/2009/04/21/hikmah-dibalik-larangan-riba/tgl 08-03-2020](https://judgeagisti.wordpress.com/2009/04/21/hikmah-dibalik-larangan-riba/tgl%2008-03-2020), pukul 10:27 WIB

mempermudah masyarakat untuk mendapatkan uang pecahan tanpa harus susah payah mengantri di Bank.⁹⁸

Perbedaan skripsi Rifki Nur Avita dengan skripsi ini adalah akad dan tata cara pelaksanaannya, yang digunakan untuk transaksi dalam skripsi Rifki Nur Avita adalah akad *ijarah 'alaa al-a'maal ijarah* sedangkan dalam skripsi ini menggunakan akad jual beli.

2. Penelitian terdahulu dengan judul skripsi “Jual Beli Uang Rusak Dalam Prespektif Hukum Islam (Studi Kasus di Pasar Wage Purwokerto Kabupaten Banyumas).” yang ditulis oleh Ilham Fahmi, penulis menarik kesimpulan bahwa:

- a. Setelah melakukan penelitian lebih mendalam bahwa jual beli uang rusak di Pasar Wage Purwokerto dalam praktiknya dilakukan setengah harga atau 50% dari nominal uang yang rusak. Misalnya si A (pedagang) mempunyai pecahan Rp. 100.000,00 rusak, kemudian *bakul duit keliling* membeli dengan harga Rp. 50.000,00. Untuk pecahan Rp. 50.000,00 rusak, dibeli dengan harga Rp. 25.000,00 baru dan begitu seterusnya. Dengan bahasa lain pada umumnya, (*bakul duit keliling*) mematok harga setengah dari nominal uang rusak yang diperjualbelikan.
- b. Dari praktik jual beli uang rusak yang terjadi di Pasar Wage Purwokerto dianggap sah jika melihat dari segi rukun dan syaratnya secara umum. Namun jika dilihat secara khusus tentang syarat jual

⁹⁸ Rifki Nur Avita, “*Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Tukar Menukar Uang (Studi Kasus di Desa Panjunan Pati Kabupaten Pati)*”, (Skripsi Program Strata 1 Jurusan Muamalah Fakultas Syari’ah dan Hukum: UIN Walisongo Semarang, 2016), h. 74

beli uang, bahwa jual beli tersebut mengandung unsur riba. Unsur riba disini adalah pihak pembeli uang rusak mengambil untung dari nilai lebih nominal uang rusak yang diperjualbelikan. Hal tersebut tidak sesuai dengan syarat-syarat dalam *sharf* yaitu: “adanya kesamaan ukuran jika kedua barang satu jenis”. Apabila barang sejenis dijual dengan sejenisnya seperti perak dengan perak atau emas dengan emas, maka tidak boleh dilakukan kecuali bila timbangan keduanya sama, meskipun berbeda kualitas dan bentuknya di mana salah satunya lebih berkualitas dari yang lain atau lebih bagus bentuknya. Berdasarkan hadis-hadis Nabi SAW diatas, “*Emas dengan emas, masing-masing kadarnya sama.*” Maksudnya, emas dijual dengan emas yang sama timbangannya bukan sifatnya, karena sesuai kaidah “emas yang bagus dan jelek sama saja.”⁹⁹

Perbedaan skripsi yang ditulis oleh Ilham Fahmi dengan skripsi ini adalah skripsi yang ditulis oleh Ilham Fahmi adalah jual beli uang rusak dalam prespektif hukum Islam sedangkan dalam skripsi ini membahas tentang jual beli gaji buruh dalam tinjauan hukum Islam dimana jual beli tersebut ditangguhkan dengan menjaminkan ATM buruh tersebut kepada si pembeli gaji buruh itu.

3. Penelitian terdahulu dengan judul skripsi “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penukaran Uang Baru Menjelang Hari Raya Idul Fitri” yang

⁹⁹ Ilham Fahmi, “*Jual Beli Uang Rusak Dalam Prespektif Hukum Islam (Studi Kasus di Pasar Wage Purwokerto Kabupaten Banyumas)*”, (Skripsi Program Strata 1 Jurusan Muamalah Fakultas Syariah:IAIN Purwokerto, 2016), h. 71-72

ditulis oleh Muflihatul Bariroh menarik kesimpulan bahwa fenomena praktik transaksi penukaran uang baru menjelang hari raya Idul Fitri adalah pada mulanya merupakan transaksi yang terlarang karena tidak sesuai dengan kaidah dalam pertukaran yang berlaku dalam Islam, yakni adanya pertukaran barang sejenis berupa uang rupiah dengan rupiah tetapi dengan takaran atau nilai yang berbeda.

Namun demikian, menurut Muflihatul Baririh transaksi tersebut menjadi sah dan diperbolehkan karena beberapa sebab. Fenomena transaksi penukaran uang baru menjelang hari raya Idul Fitri yang semakin marak di berbagai sudut jalan strategis kota besar dapat dikategorikan telah memberikan kebaikan yang berdampak pada adanya kemaslahatan terhadap manusia dalam bermuamalah untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kemaslahatan itu tercermin dengan adanya kebaikan dan tolong menolong antara penyedia jasa dan konsumen. Oleh karena itu, keadaan tersebut sesuai dengan kaidah bahwa kebutuhan pun memiliki kedudukan yang sama dengan darurat yang akan membawa kemudahan. Kemudahan tersebut tercermin melalui tersedianya jasa-jasa penukaran uang baru non Bank yang ada di berbagai sudut jalan kota besar.

Perbedaan skripsi Muflihatul Bariroh dengan skripsi penulis adalah sistem pelaksanaannya, dimana dalam penelitian Muflihatul Bariroh transaksi dalam tukar menukar uang menjelang hari raya langsung dilaksanakan oleh kedua belah pihak tersebut pada saat yang

bersamaan, sedangkan dalam penelitian jual beli gaji buruh terdapat penangguhan pembayaran yang dilakukan penjual.¹⁰⁰



¹⁰⁰ Muflihatul Bariroh, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penukaran Uang Baru Menjelang Hari Raya Idul Fitri*, (Skripsi Program Strata 1 Jurusan Muamalah Fakultas Syariah:IAIN Tulungagung, 2016), h. 123-124

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Al-Quran dan Tafsir

Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Bandung: Penertbit Diponegoro, 2005)

Sayyid Quthb, *Tafsir Ayat-Ayat Riba*, (Jakarta Selatan: Wali Pustaka, Cet. Ke-1, 2018)

Shihab, M. Quraish, *Tafsir Al-Mishbah vol. I*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002)

Sumber Hadis

Al-Asqalani, Al-Hafidz Ibnu Hajjar, *Terjemahan Bulughul Maram*, (Jeddah: Al-Thoba'ah Wal-Nashar Al-Tauzi, t. Th)

Sumber Fiqh

Al-Fauzan, Saleh, *Fiqh Sehari-hari*, (Jakarta: Gema Insani Pers, 2005)

Ali, Muhammad, *Fiqh*, (Bandar Lampung: Anugrah Utama Raharja, 2013)

Az-Zuhaili, Wahbah, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu, jilid 5, Penerjemah* : Abdul Hayyie al-Kattani, (Jakarta: Gema Insani, 2011)

Azzam, Abdul Aziz Muhammad *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2010)

Bahreisj, Hussein, *Pedoman Fiqh Islam*, (Surabaya: Al-Ikhlas, 1981)

Ibrahim, *Penerapan Fikih*, (Solo: Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2004)

Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2012)

Masadi, Ghufroon A, *Fiqh Mu'amalah Kontekstual*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002)

Mustofa, Imam, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016)

Rifa'i, Moh, *Ilmu Fiqh Islam Lengkap*, (Semarang: Toha Putra, 2005)

Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah Prinsip dan Implementasinya pada Sektor Keuangan Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016)

Sabiq,Sayyid, *Fikih Sunnah*, (Bandung: Alma'arif, 1997)

Sabiq,Sayyid, *Fiqh Sunnah*, Nur Hasanuddin, Terj, “Fiqh Sunnah”, Jilid 4, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, Cet. Ke-1, 2006)

Sudarto, *Ilmu Fikih*, (Yogyakarta: Deepublish, 2018)

Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta:Rajawali Pers, 2014)

Syafe'i, Rachmat, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000)

Syafe'i,Rahmad *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2013)

Zahra, Muhamad Abu *Ushul Fiqih*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2008)

Sumber Buku-Buku Penunjang

Ahmad, Mustaq *Etika Bisnis dalam Islam*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001)

Antonio, Muhammad Syafi'i, *Bank Syariah Dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001)

Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Yogyakarta: Rekana Cipta, 1993)

Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011)

Basyir, Ahmad Azhar *Hukum Islam, Utang-Piutang, Gadaai*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000)

Chaudry, Muhammad Sharif, *Sistem Ekonomi Islam: Prinsip Dasar*, (Jakarta: Prenada Media,2012)

Darsono, dkk, *Perbankan Syariah di Indonesia:Kelembagaan dan Kebijakan Serta Tantangan ke Depan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2017)

Departement Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008)

Dewi, Gemala *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2005)

Fauzi, Ika Yunia dan Abdul Kadir Riyadi, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam: Prespektif Maqashid al-Syari'ah*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2015)

Haroen, Nasrun *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007)

- Hasan, Ali, *Transaksi Dalam Islam*, (Jakarta:Usaha Kami, 1996)
- Hasan, M. Ali, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003)
- Huda, Nurul *Ekonomi Makro Islam Pendekatan Teoritis*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2008)
- Idri, *Hadis Ekonomi: Ekonomi dalam Prespektif Hadis Nabi*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2015)
- Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016)
- Ja'far, Khumedi, *Hukum Perdata Islam di Indonesia (Aspek Hukum Keluarga dan Bisnis)*, (Bandar Lampung: Seksi Penerbitan Fakultas Syari'ah IAIN Raden Intan Lampung Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame, 2014)
- Janwari, Yadi *Lembaga Keuangan Syariah*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2015)
- Karim, Adiwarmarman Aswar, *Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2011)
- Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2014)
- Noor, Ruslan Abdul Ghofur, *Konsep Distribusi Dalam Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013)
- Qardhawi, Yusuf, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, (Jakarta: Gema Insani, 1997)

Sumber Artikel (Online):

- Judgeagisti, *Hikmah Dibalik Larangan Riba*,
[https://judgeagisti.wordpress.com/2009/04/21/hikmah-dibalik-larangan-riba/tgl 08-03-2020](https://judgeagisti.wordpress.com/2009/04/21/hikmah-dibalik-larangan-riba/tgl%2008-03-2020), pukul 10:27 WIB

Sumber Jurnal:

- Nur, Efa Rodiah “*Riba dan Gharar*”, Al-Adalah. Vol. XII No 3, Juni 2015, h. 649.
 Tersedia di:
<http://www.ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah/article/view/247/390>

Sumber Skripsi:

Ilham Fahmi, *“Jual Beli Uang Rusak Dalam Prespektif Hukum Islam (Studi Kasus di Pasar Wage Purwokerto Kabupaten Banyumas)”*, (Skripsi Program Strata 1 Jurusan Muamalah Fakultas Syariah:IAIN Purwokerto, 2016)

Muflihatul Bariroh, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penukaran Uang Baru Menjelang Hari Raya Idul Fitri*, (Skripsi Program Strata 1 Jurusan Muamalah Fakultas Syariah:IAIN Tulungagung, 2016)

Rifki Nur Avita, *“Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Tukar Menukar Uang (Studi Kasus di Desa Panjunan Pati Kabupaten Pati)”*, (Skripsi Program Strata 1 Jurusan Muamalah Fakultas Syari’ah dan Hukum: UIN Walisongo Semarang, 2016)

